PEMUDA O	Nomor SOP	5.24.5 /B-IV/V/2023	
THE THE PARTY OF	Tanggal Pembuatan	24 Mei 2023	
KEMENT POLITICAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE POLITICAL PROPERTY OF	Tanggal Revisi		
R. H. HOONEST	Tanggal Efektif		
STIK INDOV	Disahkan oleh	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		-h	
Biro Hubungan Masyarakat dan Umum		Triyono, SP., M.Si NIP 19740605 200012 1 001	
	Standar Operasional Prosedur		
Bidang Kehumasan	PENANGAN	AN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	

December 11 to 12	Mark Charles and Lance
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memiliki pengetahuan di bidang kepemudaan dan/atau keolahragaan dan program -
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	program lain yang diiakukan Kemenpora;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan	2. Memiliki Keterampilan Mengelola Data dan Informasi yang Telah Dilatih untuk
Publik	Menyampaikan Informasi secara Lengkap, Terbuka, Bertanggung Jawab, serta Santun
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	Kepada Pihak yang Memerlukan
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian	
Negara	
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi	
Publik	
6. Permenpora Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	
Pemuda dan Olahraga	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Secara Langsung dan Tidak Langsung	1. Alat Tulis Kantor
2. SOP Pengelolaan Pengajuan Keberatan Atas Informasi Secara Langsung dan	
	2. Printer dan Komputer
Tidak Langsung	2. Finite dan Komputer
3. SOP Pelaksanaan Uji Konsekuensi	74
	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan non elektronik sebagai bukti dan bahan
1	referensi
1	57 C.

Penanganan Sengketa Informasi Publik

No.	Keglatan P		Pelaksana		Mutu Baku			
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima surat panggilan sidang sengketa Informasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dan memerintahkan PPID untuk menyiapkan bahan berkaitan sidang sengketa informasi dimaksud				Surat Panggilan Sidang	1 Jam	Surat Panggilan Sidang	
2	Memerintahkan penyiapan riwayat penanganan permohonan informasi dimaksud disertai telaah				Surat Panggilan Sidang	1 Jam	Surat Panggilan Sidang	
3	Menyiapkan riwayat penanganan permohonan informasi dimaksud disertai draf telaah				Surat Panggilan Sidang Riwayat Penanganan Permohonan Informasi	1 Hari	Draf Telaah	
4	Memeriksa kesesuaian dan menyampaikan riwayat penanganan permohonan dan hasil telaah		•		Draf Telaah dan Riwayat Penanganan Permohonan Informasi	1 Hari	Hasil Telaah	Dapat meminta keterangan dari unit terkait atau meminta pertimbangan tertulis dari Tim Pertimbangan
5	a. Menghadiri panggilan sidang pemeriksaan b. Apabila Atasan PPID tidak dapat menghadiri persidangan maka menerbitkan surat kuasa kepada PPID dan PPID Pelaksana untuk menghadiri persidangan			Tidak	1. Surat Panggilan Sidang. 2. Dokumen Kelengkapan Persidangan, 3. Telaah dan Riwayat Penanganan Permohonan Informasi	1 Hari	Berita Acara Sidang Pemeriksaan, Surat Kuasa	Apabila Atasan PPID tidak dapat menghadiri menerbitkan surat kuasa khusus
6	Menghadiri dan melaporkan hasil persidangan sengketa informasi				1. Surat Kuasa 2. Surat Panggilan Sidang. 3. Dokumen Kelengkapan Persidangan. 4. Telaah dan Riwayat Penanganan Permohonan Informasi	1 Hari	Berita Acara Sidang Pemeriksaan	
7	Menghadiri persidangan sengketa informasi			→	Surat Panggilan Sidang. Dokumen Kelengkapan Persidangan. Telaah dan Riwayat Penanganan Permohonan Informasi	1 Hari	Berita Acara Sidang	